



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 523-536

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Pemertahanan Kekuasaan dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Melalui Perspektif Niocolo Machiavellei dan Jhon Hobbes

Muchlas Abror^{1✉}, Anggun²

Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

Email: class.hamka@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menggunakan novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer. Novel tersebut menceritakan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam (DI) di wilayah Banten Selatan. Hal tersebut merepresentasikan bahwa setiap negara merdeka tidak lantas terbebas dari gangguan baik dari negara lain maupun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Dengan demikian peran penguasa dalam menjaga dan mempertahankan kekuasaan menjadi sangat penting. Untuk menjelaskan hal tersebut digunakan perspektif Jhon Hobbes dan Niocolo Machiavellei karena keduanya sama-sama menaruh perhatian pada kekuasaan absolut negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan data pada novel kemudian dilanjutkan analisis melalui perspektif kekuasaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara penguasa menjaga kekuasaannya dari gangguan pemberontakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara dipertahankan melalui membentuk dominion-dominion pada suatu wilayah kekuasaan, sementara kekuasaan pada dominion dipertahankan melalui pemberian hak-hak warga yang tidak mereka dapatkan dari penguasa sebelumnya.

Kata Kunci: *Kekuasaan, Niocolo Machiavellei, Jhon Hobbes, Pramoedya Ananta Toer*

Abstract

This research uses the novel *Once an Event in South Banten* by Pramoedya Ananta Toer. The novel tells of a rebellion carried out by Darul Islam (DI) in the South Banten region. This represents that every independent country is not necessarily free from interference from other countries or rebellions carried out by the people of a country. Thus, the role of the ruler in maintaining and maintaining power becomes very important. To explain this, the perspective of John Hobbes and Nioccolo Machiavellei is used because both of them are concerned with the absolute power of the state. This research uses a descriptive analysis method by describing the data in the novel and then continuing the analysis through a power perspective. The aim of this research is to find out how rulers maintain their power from rebellion. The results of this research show that state power is maintained through establishing dominions in a territory, while power in a dominion is maintained through giving citizens rights that they did not get from the previous ruler.

Keywords: *Power, Nioccolo Machiavellei M Jhon Hobbes, Pramoedya Ananta Toer*

PENDAHULUAN

Integrasi bangsa yang lemah dan penguasaan IPTEKS lemah dapat menyebabkan bangsa Indonesia dapat terjajah kembali atau setidaknya daya saing bangsa melemah (Taufiqurrahman 2018). Kemerdekaan merupakan sesuatu yang harus terus dipertahankan dan dilakukan perbaikan terhadap sistem-sistem yang dianggap masih lemah. Dengan kata lain kemerdekaan suatu negara bukan berarti membebaskannya dari ancaman-ancaman baru yang mengganggu stabilitas negara baik yang dilakukan oleh negara lain maupun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Jenis dan bentuk ancaman yang terjadi di Indonesia terus menerus mengalami pergeseran menjadi ancaman multidimensional, yang tidak lagi mengarah kepada ancaman militer saja melainkan juga sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan (Eko 2015).

Ancaman militer yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Belanda sebelum akhirnya mengalami kekalahan pada 8 Maret tahun 1942 dari Jepang yang disertai dengan penyerahan tanpa syarat tidak lantas membuat Indonesia Merdeka, melainkan menandai era baru yang tidak kalah menyengsarakan karena paksaan menjadi Romusa yang menyebabkan penderitaan dan kelaparan bagi Masyarakat (Yasmis 2007). Hal tersebut sebagai contoh nyata bahwa ancaman selalu datang dari manapun. Sementara pasca kemerdekaan ada beberapa pemberontakan yang terjadi di antaranya PKI Madiun 1948, Pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam pada tahun 1948, dan DI/TII yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Banten (Anon 2021). Pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat internal Indonesia sendiri

merupakan suatu bentuk ancaman multidimensional yang mengganggu keamanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan.

Salah satu yang akan dibahas dalam jurnal ini terkait dengan pemberontakan yang dilakukan DI/TII yang kemudian dijadikan bahan oleh Pramoedya untuk menulis novel dengan yang berjudul Sekali Peristiwa Di Banten Selatan (SPDBS). Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Hal tersebut makin memperparah gangguan stabilitas negara yang baru saja merdeka. Kilas balik ke sejarah bangsa Indonesia yang sebagai negara merdeka ternyata tidak begitu saja terbebas dari gangguan pemberontakan. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia selama tiga setengah abad dan penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun, tidak lantas menumbuhkan kesadaran pada masyarakat Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan yang menjadi modal utama kemerdekaan Indonesia dapat diraih. Seperti pemberontakan yang dilakukan oleh DII/TII dipicu oleh ketidakcocokan pada penegakan hukum, perbedaan ideologi, dan pemerataan ekonomi menjadi pemicu pemberontakan-pemberontakan di Indonesia (Gongong 2004). Pemberontakan DI/TII sebetulnya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, melainkan juga meluas sampai ke Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakka.

Pramoedya sebelum menulis novel SPDBS, pernah berkunjung ke wilayah Banten Selatan. Selang beberapa hari setelah kunjungannya pemberontakan DII di wilayah tersebut pun pecah. Dari peristiwa itu kemudian menjadi inspirasi baginya untuk menuliskannya menjadi suatu karya yang monumental. Melalui novel SPDBS Pram mencoba memberikan gambaran bagaimana seharusnya negara dan masyarakat dalam menghadapi suatu pemberontakan. Dalam novel dikisahkan kehidupan rakyat miskin yang kurang mendapatkan perhatian oleh pemegang kekuasaan. Infrastruktur yang tidak lengkap, kemiskinan yang merata, serta Pendidikan bagi masyarakat yang belum maksimal. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk berkuasa di daerah tersebut. Namun kekuasaan tersebut tidak digunakan untuk membela orang lemah, melainkan sebaliknya memanfaatkan masyarakat yang miskin dan kurang pendidikan makin terperosok pada kesengsaraan melalui tindakan yang sewenang-wenang. Dalam novel SPDBS agama digunakan sebagai tameng kemunafikan penguasa. Hal ini senada dengan pendapat Machiavelli dalam Larrain yang menganggap agama dapat digunakan sebagai alat pemutar balik psikologi yang menjadikan seseorang tidak mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan sosialnya (Larrain 1996). Artinya seseorang tidak mampu menggunakan rasionalitasnya dengan baik jika suatu hal sudah dibungkus dengan doktrin agama. Agama digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan melegitimasi (Daya Negeri Wijaya 2016).

Pram dalam novelnya menggambarkan suatu masyarakat yang pasrah pada suatu kekuasaan meskipun itu menindas. Senada dengan Hobbes yang mengatakan bahwa manusia adalah srigala bagi manusia yang lain (Daya Negeri Wijaya 2016). Penguasa bukanlah orang yang benar-benar melindungi rakyatnya. Dirinya adalah srigala yang menjadikan orang lain sebagai mangsanya demi mempertahankan eksistensi kekuasaannya. Namun demikian sebaliknya bahwa penguasa tersebut juga selalu dinantikan kejatuhannya melalui pemberontakan. Hal itulah yang dikemukakan oleh Machiavelli dalam *Il Principe* dan juga Pram pada novel *SPDBS*, kekuasaan Lurah yang sewenang-wenang akhirnya kalah dengan adanya persatuan dari rakyat dengan dukungan dari KOD. Namun tidak semua penguasa bersikap buruk dan menindas. Hal itu yang terjadi di Burgundy, Brittany, Gascony, dan Normandy suatu wilayah-wilayah yang bersatu dengan Perancis, Masyarakat dapat hidup tentram (Machiavelli 2017). Hal itu karena penguasa baru di wilayah tersebut masyarakat diperbolehkan hidup dengan undang-undang yang telah ada. Sementara pemberontakan DI/TII khususnya di Jawa Barat terjadi karena kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Kartosuwiryo pada isi perjanjian Renville pada 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal itu dianggap sebagai suatu penghianatan (Aisyah 2022). Namun dalam novel Pram lebih menyoroti dampak dari pemberontakan tersebut yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, dan karena itu pula mendorong masyarakat untuk melakukan perlawanan dengan menempel pada kekuasaan yang lebih besar yaitu negara.

Mengingat bahwa suatu negara merdeka tidak pernah lepas dari adanya gangguan keamanan karena adanya pemberontakan maka novel tersebut menjadi menarik untuk dianalisis melalui perspektif kekuasaan. Setidaknya untuk mengingatkan kepada pembaca dan pemerintah agar selalu siap dalam menghadapi dan mencegah gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi. Hal tersebut perlu dikaji melalui perspektif kekuasaan Niccolo Machiavelli dan Jhon Hobbes dengan alasan bahwa pandangan kedua tokoh tersebut masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan kajian khususnya berkaitan dengan kekuasaan.

Machiavelli membagi negara menjadi dua macam, yaitu kerajaan dan republik. Perbedaan keduanya terletak dari bagaimana penguasa diangkat. Namun, tidak menutup kemungkinan cara memerintahnya dilakukan secara silang (Machiavelli 2017). Artinya, dalam negara republik yang memiliki batas waktu dalam kepemimpinan, penguasa dapat memerintah dengan cara kekerasan, sementara negara yang menganut sistem kerajaan dimana kekuasaan diperoleh secara turun temurun dan absolut, dapat dikelola dengan semangat kerakyatan (Benedanto 2013). Hal itu menunjukkan bahwa kemakmuran suatu

negara bukan ditentukan oleh bentuk suatu negara melainkan bagaimana penguasa menggunakan kekuasaannya. Penguasa atau raja yang berkehendak atas kemauannya sendiri melalui kekuasaan absolut yang diperlolehnya akan memperlakukan masyarakat pasrah dan patuh (Carl 2004). Penguasa yang semacam itu tidak akan mampu memperoleh kekasaan yang lama, karena masyarakat yang lemah akan berkoloni dan kemudian melakukan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Kekuasaan harus digunakan bukan untuk menindas melainkan memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakatnya.

Penguasaan wilayah jajahan harus terus mendapatkan kontrol dari penguasa. Pengerahan pasukan atau bersahabat dengan penduduk setempat dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas pada wilayah tersebut. Namun, untuk daerah-daerah yang telah terbiasa hidup dengan undang-undang mereka, Machiavelli merumuskan tiga hal. Pertama dengan merampas milik mereka; kedua datang dan menetap; ketiga memperbolehkan masyarakat hidup dengan undang-undang mereka sendiri (Machiavelli 2017).

Pasca kemerdekaan pada 1945, Indonesia terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, salah satunya dilakukan oleh Darul Islam (DI). DI merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki ideologi Islam. Pemberontakan mereka terhadap negara bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Dengan demikian setiap negara merdeka harus tetap memposisikan dirinya dalam situasi perang. Kondisi semacam itu untuk menyiapkan diri dari ancaman-ancaman yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Pengetahuan tentang suatu masyarakat harus dimiliki oleh seorang penguasa sebagai strategi dalam menghadapi ancaman yang mengganggu keutuhan negara.

Machiavelli mengatakan bahwa suatu negara akan terus menghadapi pemberontakan baik dari negara lain maupun dilakukan oleh masyarakatnya sendiri karena penguasa dianggap tidak mampu mewujudkan harapan-harapan mereka. Harapan-harapan yang muncul merupakan suatu bentuk hasrat manusia alami yang selalu ingin terpenuhi. Dengan demikian tanpa keberadaan pemimpin yang kuat dan cerdas maka negara merdeka akan terus dilanda pemberontakan karena keinginan-keinginan masyarakat yang beragam tersebut tidak bisa diorganisir oleh penguasa. Keterbatasan kekuatan yang dimiliki individu menjadikan mereka tidak mungkin mewujudkan keinginan sendiri-sendiri, mereka akan cenderung membuat kelompok dengan ideologi dan tujuan yang sama. Meskipun di sisi lain setiap individu selalu bersaing dengan individu lain dalam mempertahankan dirinya untuk meraih kekuasaannya (Suhelmi, Barat, and Utama 2007). Dengan kekuatan secara kelompok ini, kemudian dipilihlah seorang pemimpin yang diharapkan mampu memberikan

keselamatan pada diri mereka. Namun, jika hal itu tidak terealisasi, maka dukungan akan berbalik menjadi pemberontakan melawan kekuasaan. Hal ini karena menurut Hobbes agresifitas diperlukan oleh seseorang untuk menjadikan dirinya selamat. Machiavelli dalam bukunya *Il Principe* menjelaskan bagaimana suatu kekuasaan menjaga wilayah yang baru saja dikuasainya (Machiavelli 2017). Ada dua cara yang ditawarkan pertama dengan menempatkan pasukan pada daerah kekuasaannya dan kedua membentuk suatu koloni yang terdiri dari masyarakat untuk ikut serta menjaga wilayah tersebut.

Tawaran yang pertama dianggap sebagai pemborosan negara meskipun penguasa akan segera mengetahui dan menumpas pemberontakan yang terjadi. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya, negara akan mengalami kekalahan dari musuh yang melakukan balas dendam sementara anggaran keamanan sudah tidak tersedia. Yang kedua dianggap lebih efisien karena adanya dukungan dari masyarakat yang akan membantu mengamankan wilayah tersebut secara suka rela dengan biaya yang mereka keluarkan sendiri. Dengan kata lain poin tersebut menyaratkan adanya pembentukan dominion atau perpanjangan tangan penguasa pusat di wilayah yang dikuasainya. Penguasa pada dominion harus memiliki arah kebijakan yang sama dengan penguasa pusat, dengan begitu adanya kontrol dari penguasa pusat merupakan syarat utama. Apabila hal itu dapat diwujudkan maka pemberontakan dapat diselesaikan dengan mudah tanpa mengeluarkan biaya yang banyak yang dapat merugikan penguasa dan negara.

Kembali lagi bahwa suatu masyarakat pendukung penguasa adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki sifat alamiah seorang tiran jika merujuk pada pendapat Hobbes, maka kepentingan-kepentingan individu tersebut harus diorganisir oleh seorang penguasa. Kebijakan penguasa harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat harus taat pada penguasa dan negara. Artinya masyarakat juga perlu ikut serta dalam menjaga keutuhan suatu negara. Namun sayangnya baik Machiavelli dan Hobbes sama-sama tidak menyukai penguasa memimpin dengan cara demokratis. Mereka berpandangan bahwa sistem otoriterlah yang tepat mengingat bahwa setiap individu memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan begitu negara haruslah kuat, apabila negara lemah maka akan menimbulkan anarki, perang sipil dan berujung perpecahan (Suhelmi 2007). Apabila mereka merasa keinginan dan kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh penguasa maka mereka berpotensi menggugat kekuatan untuk meruntuhkan kekuasaan tersebut dengan berbuat anarki dan hal itu dapat dicegah dengan cara membuat masyarakat tidak berdaya sehingga tunduk pada penguasa. Namun bukan berarti kekuasaan telah menemui tempat yang nyaman. Negara akan selalu dihantui oleh adanya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan dari tujuan hidup bersama yang tidak terpenuhi (Sanit

2016). Mereka akan selalu mendapatkan ancaman baik dari luar maupun dari masyarakatnya sendiri yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Meningat bahwa masyarakat menjadi objek yang tidak berdaya, maka mereka akan mencari sandaran kekuatan baru dari seorang penguasa yang dianggap dapat mengembalikan keinginan-keinginan dan harapan mereka. Besarnya ancaman yang selalu muncul membuat negara dan masyarakat harus selalu dalam keadaan perang (Colson 2013).

Masyarakat harus senantiasa turut serta menjaga keutuhan negara dan hal itu dapat dilakukan dengan cara mewaspadaai gerak-gerik masyarakat yang tidak sejalan dengan negara dan tidak taat pada hukum negara. Hukum menjadi syarat fundamental pada suatu negara yang diciptakan oleh penguasa untuk mewujudkan keadilan. Hukum dan keadilan akan berarti jika masyarakat memiliki kekuasaan bersama (Nasution 2016). Dengan demikian negara harus menyertakan setiap masyarakat untuk terlibat dan menjadi seorang informan yang baik bagi negaram dengan syarat negara harus mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Adanya perang dari masyarakat tersebut dapat mencegah terjadinya pemberontakan-pemberontakan pada suatu negara akan dengan mudah diatasi tanpa menunggu suatu kekacauan besar terjadi terlebih dahulu. Mengingat bahwa mengatasi pemberontakan yang terjadi dari dalam lebih sulit karena pengerahan kekuatan militer seperti yang terjadi di Srilangka. In May 2009, after two and a half decades of sporadic violent conflict, the Sri Lankan Civil War, which majority Sinhalese and the minority Tamil populations, finally drew to a close. The end of this war was especially bloody, with charges of rampant human rights violations on the part of the two principal parties, the Sri Lankan armed forces and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (Ltte)(Ganguly 2018). Jika itu dilakukan di Indonesia yang notabene sebagai negara yang baru Merdeka dan mendapatkan sangsi dari PBB maka akan menghambat kemajuan negara, dengan demikian militer juga harus memiliki strategi jitu guna menumpas pemberontakan, di antaranya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menyelesaikan hal tersebut. Adanya peran serta masyarakat akan menjadikan beban negara menjadi ringan karena suatu negara memiliki tugas untuk mewujudkan keinginan semua masyarakat, tidak hanya pada suatu wilayah melainkan di berbagai wilayah yang berbeda-beda dengan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak sama.

Dengan demikian, sekalipun suatu negara telah merdeka, penguasa tidak boleh lalai terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya sekali lagi bahwa negara harus selalu siap siaga dalam keadaan perang. Seorang penguasa tetap harus memiliki strategi untuk mempertahankan kekuasaannya sembari mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat pendukungnya. Tanpa hal tersebut, kekacauan yang diakibatkan karena pemberontakan

masyarakat yang kecewa akan terus terjadi dan dapat menjadi simalakama bagi keberlangsungan kekuasaan dan keutuhan negara. Penjelasan terkait dengan pandangan Niccolo Machiavellei dan Jhon Hobbes tersebut sebagai gambaran bahwa kekuasaan tidak pernah dinamis, selalu muncul dan menjadi ancaman baik dari dalam maupun luar. Hal ini yang perlu diwaspadai oleh penguasa untuk selalu berada posisi waspada, agar ketika suatu kekacauan terjadi, dapat dengan cepat diatasi sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.

Machiavellei dan Jhon Hobbes menaruh perhatian pada keutuhan suatu negara dalam menghadapi bahaya berupa serangan baik dari negara lain maupun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam suatu negara tersebut. Keduanya merupakan penganut kekuasaan absolut negara akan tetapi mereka tetap setuju terhadap hak milik individu dan pergantian kekuasaan-meski hak milik individu inilah yang nantinya ditentang oleh Marxisme. Dengan begitu, bagaimana suatu kekuasaan seharusnya diraih dan dipertahankan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskripsi analisis dengan teknik baca simak catat. Penelitian diawali dengan pembacaan novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan (SPDBS) secara cermat, dilanjutkan pemberian tanda pada data baik dalam bentuk pernyataan, kalimat, maupun paragraf yang sesuai dengan tujuan penelitian pada jurnal ini. Setelah data berkaitan dengan cara pemertahaan kekuasaan diperoleh, dilanjutkan dengan analisis deskriptif terkait strategi pemertahaan kekuasaan dalam novel melalui perepektif kekuasaan Machiavellei dan Jhon Hobbes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan dikategorikan sebagai novel sejarah. Pramoedya menulis cerita tersebut setelah sebelumnya dia melakukan perjalanan ke Banten Selatan dan selang beberapa hari terjadi peristiwa yang digambarkan oleh Pram meskipun dengan adanya bumbu cerita di sana sini.

Cerita diawali dari suatu desa terpencil dengan sarana prasarana yang memprihatinkan di wilayah Banten Selatan. Dalam cerita, penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari penduduk desa adalah petani dan pedagang yang selalu tertekan karena adanya ancaman dari Darul Islam (DI). Kekacauan di desa tersebut terjadi setelah Lurah Musa mencari Ranta, warganya, untuk dipaksa menjadi pencuri bibit karet milik onderneming atau perkebunan. Ranta terpaksa melakukannya karena adanya ancaman yang

dilakukan oleh Lurah Musa.

Keberhasilannya mencuri bibit karet tersebut tidak dibayar dengan upah yang setimpal melainkan sebaliknya. Setelah Ranta menyerahkan bibit karet pada Lurah Musa, dia disiksa dan didakwa mencuri bibit karet miliknya dengan tujuan agar Lurah Musa tidak memberikan upah tambahan. Pada peristiwa pertama, Ranta tidak berani untuk melawan karena dia diancam akan dihabisi oleh anggota DI. Lurah Musa sendiri adalah pemimpin DI di kampung tersebut, sehingga jika Ranta nekat melawan ketika dia didakwa dan disiksa, maka dengan segera dia akan dihabisi oleh DI. Rasa takut menolak perintah dan ketidakberaniannya melakukan perlawanan pada penyiksaan pertama, kembali dimanfaatkan oleh Lurah Musa untuk menyuruhnya mencuri bibit karet untuk yang kedua kali. Keberhasilannya mencuri bibit karet untuk yang kedua kalinya tersebut juga mendapatkan perlakuan yang sama. Namun, untuk yang kedua kali ini, kemarahan Ranta memuncak dan melakukan perlawanan terhadap Lurah Musa.

Keberanian Ranta tersebut muncul setelah ada dukungan dari dua warga yang mengalami nasib serupa. Hal itu membuat Lurah Musa Marah dan menyuruh gerombolannya untuk membakar rumah Ranta, tetapi Ranta dan istrinya telah melarikan diri dan membawa bukti berupa surat-surat yang menyatakan Lurah Musa adalah pimpinan DI dari tas yang tertinggal sewaktu Ranta ingin menghabisinya. Lurah Musa berhasil ditangkap dan Ranta diangkat sebagai Lurah pengganti di desa tersebut. Cerita tidak berhenti sampai di situ. Setelah Lurah Musa ditangkap perang antara Tentara yang dibantu Ranta dengan persatuan warganya melawan gerombolan DI pun terjadi dengan kemenangan di pihak Tentara. Setelah semua anggota DI berhasil ditumpas, akhirnya Ranta diangkat sebagai Lurah tetap di desa tersebut. Dia menjadi lurah karena dia dianggap telah berjasa membantu tentara dan dapat mengayomi warganya serta mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya.

Pemertahanan Kekuasaan pada Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan

Pasca kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada suatu pemberontakan, salah satunya adalah Darul Islam (DI). DI terdiri dari kumpulan masyarakat pribumi yang merasa kecewa dengan bentuk negara republik dan pancasila sebagai ideologi yang diterapkan di Indonesia. Hal ini yang menjadi potret dalam cerita pada novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer.

Kisah ini terjadi di sebuah kampung yang terletak di Banten Selatan. Wilayah tersebut digambarkan terpencil dengan alam yang indah tetapi penduduk hidup dalam keadaan miskin dan memprihatinkan, infrastruktur tidak memadai serta pungutan pajak jalan yang mereka harus bayar pada onderneming.

Dari jarak dekat, pegunungan di depan desa itu, yang dirimbuni berbagai pepohonan hutan, berwarna kelabu hitam. Antara sebentar terdengar cericip burung kedinginan. Kadang-kadang angin menderu keras membawa bunyi sayup debur Laut Hindia. Gemercik air kali membanji yang membanting diri di antara batu-batu besar tak henti mengema, serta hempasan arus derasnya pada tebing-tebing yang terbuat dari beton alam antara sebentar terdengar menjompak-jompak ngilu (Toer 2007).

Desa digambarkan masih asri dengan pepohonan yang lebat, suara-suara burung, dekat dengan Laut Hindia, serta sungai yang mengalir deras. Namun, keadaan tersebut digambarkan muram berwarna kelabu hitam. Hal itu karena keadaan penduduk yang miskin dan memprihatinkan meskipun kampung tersebut dekat aliran sungai yang jernih, tanah yang subur yang dilukiskan melalui pepohonan yang rimbun dan Samudera Hindia yang kaya akan biota laut termasuk ikan. Akan tetapi, ketiadaan fasilitas serta sarana prasarana yang memadai menjadikan penduduk tidak mampu membangkitkan geliat ekonominya sendiri. Ditambah lagi adanya pajak yang mereka harus bayar ke onderneming

Lewat jalan yang kita buat sendiri kita bayar pajak pada onderneming. Dua pintu jalan, dua kali pajak. Kalau kau coba-coba beli gerobak, beberapa pajak mesti dibayar, tiap kali lalui dua pintu jalan onderneming itu (Toer 2007).

Dalam hal ini Machiavelli dalam *Il Principe* mengatakan bahwa penguasa yang tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat selalu akan menghadapi ancaman berupa pemberontakan oleh masyarakat. Mengingat bahwa penguasa mendapat dukungan dari rakyat, maka ada harapan kehidupan yang lebih baik yang akan diberikan kepada mereka. Namun, ketika harapan itu tidak mereka dapatkan, maka pemberontakan demi pemberontakan akan terjadi, entah dilakukan oleh negara lain yang mendapatkan dukungan dari penduduk setempat maupun dari masyarakatnya sendiri.

Dalam suatu perebutan kekuasaan selalu ada yang dirugikan. Hal inilah yang digambarkan dalam novel. Nasib buruk penduduk selain fasilitas dan sarana prasarana yang tidak memadai, diperparah lagi adanya pemimpin pemberontak yang mengambil keuntungan dari negara melalui rakyat yang lemah. Hal itu yang dilakukan oleh Lurah Musa yang ternyata seorang Kepala Residen DI di wilayah itu.

Pasar diobrak-abrik Di. Sudah tahu, Ta? Jadi binimu juga gagal. Nah waktu baik, musim baik. Malam ini, Ta, ingat-ingat, nanti jam sebelas malam.

Pekerjaan apa Gan?

Ambil bibit karet, ya?...

Tahun yang lalu kau juga yang kusuruh ambil bibit karet. Sekarang kau juga yang kusuruh. Apa susahnya? (Toer 2007).

Dalam pemberontakan dibutuhkan modal yang banyak. Cara mendapatkan modal diantaranya dengan menjadikan hal milik negara sebagai milik pribadi atau melakukan perampasan terhadap hak milik masyarakat yang lemah yang kemudian sebagai surplus pada kas pemberontak dan pastinya melalui tangan rakyat yang lemah. Hal tersebut yang dilakukan oleh Lurah Musa sebagai Kepala Residen. Dia memanfaatkan Ranta, masyarakat miskin yang lemah untuk mencuri bibit karet milik perkebunan atau onderneming. Bagi penduduk miskin, rasa lapar memang dianggap lebih menyakitkan dibandingkan mendapatkan hukuman. Jikalau pun tertangkap dan mendapatkan hukuman, alasan itulah yang membuat Ranta mau menuruti perintah Lurah Musa dan tidak berani menolak. Selain itu, ia tidak berani menolak karena akan mendapatkan siksaan dari anggota DI yang makin memperparah derita kehidupannya menjadi orang miskin. Penindasan Lurah Musa pada Ranta dan masyarakat lainnya, merupakan suatu upaya pemertahanan kekuasaan. Suatu kekuasaan membutuhkan sokongan dari masyarakat. Penguasa tidak diperbolehkan memimpin dengan semena-mena, karena kekuasaan merupakan sesuatu yang diberikan oleh rakyat (Adisulistiyono 2013). Namun yang dilakukan Lurah Musa sebaliknya dan hal itu yang akhirnya membangkitkan keberanian Ranta serta masyarakat lainnya untuk melakukan perlawanan.

Aku tak takut dibui. Mereka suruh aku curi bibit karet onderneming. Aku bawa sampai dua kali balik. Mereka bilang. "Cukup, pulang kau!" Aku tanya, "Mana upahku?" Mereka beri aku upah pukulan rotan, merampas pikulan dan golokku. Tahu apa mereka bilang? "Jangan berani-berani ke sini curi bibitku, ya?..."

Kekayaan mereka diperoleh dari Maling. Ireng, kau ingat waktu anak kuta yang pertama sakit keras, pinjam hutang pada mereka? Anak kita meninggal. Panen seluruhnya mereka ambil. Kita kelaparan terpaksa jual tanah. Mereka juga yang ambil tanah kita. Berapa harganya? Tak cukup buat modal dagang di pasar! Ludes! Kuras (Toer 2007).

Machiavelli mengatakan bahwa seorang penguasa harus memberikan hukuman yang maksimal pada masyarakat (Machiavelli 2017). Dengan menjadikan masyarakat lemah dan tidak berdaya, maka akan menghindarkan adanya perlawanan balik dari mereka. Hal itulah yang dialami oleh Ranta dan penduduk setempat. Mereka selalu dibayangi ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh Lurah Musa dan anggota DI. Bahkan ketika mereka dipermainkan sekalipun, masyarakat yang lemah tidak akan berani melawan, seperti yang terlihat ada kutipan perampasan tanah di atas.

Dalam hal lain Hobbs mengatakan bahwa setiap individu adalah tiran serigala bagi yang lainnya, artinya bahwa mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Dengan demikian sifat

alamiah tiran selalu ada dan bisa muncul dalam momen tertentu. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan kekuasaan seperti yang melakukan penindasan kepada mereka. Melalui kepemilikan kekuasaan mereka berharap bisa menyudahi penderitaan yang dialami. Namun, hal itu jelas tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Seseorang yang lemah membutuhkan kekuatan tambahan dari mereka yang mengalami nasib yang sama. Dengan kata lain, mereka perlu bersatu untuk membangkitkan keberanian untuk melakukan perlawanan bersama-sama.

Yang Pertama menarik Ranta dan didudukkannya di ambin. Katanya:

Dengar. Tahun yang lalu begitu juga yang kualami. Lihat punggungku.

Kemudian yang pertama membuka baju kaos kutangnya. Setelah Ranta melihatnya ia mengenakan bajunya kembali....

...Kalau tahu begitu, nanti kalau ada pemilihan lurah mesti kita pilih

Dengan mata berseri-seri Yang Kedua mengiyakan. Ireng pun nampak berseri. Sedangkan Ranta sendiri pun berseri dan dengan nada berterima kasih tanpa ber-pura-pura malu menyambutnya: kalau ada yang pilih aku jadi lurah tentu aku terima. Tapi aku takkan calonkan diri. Aku tak mau keluarkan biaya. Tapi kalau aku dipilih, tentu pilihan aku terima (Toer 2007).

Keadaan dan nasib warga lain yang mengalami penderitaan yang sama dengan Ranta itulah yang akhirnya menyatukan mereka. Namun, sayangnya tanpa ada kekuatan lain yang setara atau lebih besar dengan kekuatan pemberontak, maka persatuan tersebut hanya akan menghadirkan penderitaan yang makin parah. Seperti yang dikatakan Machiavelli dalam bukunya *Il Principe* bahwa rakyat yang lemah perlu menggabungkan diri atau mendukung kekuatan yang lebih besar (Toer 2007). Tujuan tersebut agar mampu mengubah nasib mereka, mengingat jika perlawanan tersebut dilakukan tanpa adanya bantuan, maka hanya akan berujung pada kesengsaraan. Hal itu yang dilakukan oleh Ranta dan beberapa warga yang pernah mendapatkan tindakan buruk dari Lurah Musa, yaitu dengan menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan Komandan KOD yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya penggabungan kekuatan tersebut, akhirnya pemberontakan Darul Islam dapat ditumpas dan atas penunjukan dari Komandan KOD, Ranta diangkat sebagai lurah.

Aku percaya padamu, Ranta. Mulai hari ini kau jadi lurah di sini (Toer 2007).

Setelah Ranta ditetapkan sebagai lurah, cara dia mempertahankan kekuasaannya berdiri di dua sisi. Ranta menjadi orang kepercayaan KOD sekaligus menjadi pemimpin warga desa yang berusaha memfasilitasi keinginan-keinginan mereka yang selama ini tidak mereka dapatkan dan hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Atas bantuan dari prajurit KOD, Ranta berhasil menyatukan warga untuk gotong royong membangun waduk sebagai

irigasi sawah-sawah mereka, membangun jalan, membuka ladang baru dan menyuruh warga untuk sekolah.

Benar juga orang tadi.

Ranta bertanya: Apa yang benar Pak?

Ini, kalau sejak dulu begini...

Abdi pikir semalam, Pak. Kalau waduk sudah jadi kita tanamiikan. Aduh, tiap orang boleh menangkap ikan di situ. Tapi tiap orang Wajib juga memelihara supaya besar-besar (Toer 2007).

SIMPULAN

Suatu negara tidak pernah dapat lepas dari adanya gangguan baik dari luar yang dilakukan oleh negara lain, maupun dari dalam negara karena perbedaan ideologi. Hal ini harus disadari oleh seorang pemimpin apabila ia ingin lebih lama mempertahankan kekuasaannya. Mengingat bahwa kekuasaan tidak bersifat statis melainkan dinamis, artinya selalu ada hal-hal yang mengganggu dan memperebutkannya.

Seorang penguasa harus memiliki strategi perang yang baik sekaligus mampu menghimpun kekuatan masa pendukungnya. Tanpa adanya kedua hal tersebut, maka kekuasaan tidak akan bertahan lama. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Machiavelli dapat dilakukan dengan membentuk dominion-dominion pada suatu wilayah kekuasaan yang luas. Adanya dominion-dominion selain mampu membantu penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya juga bertujuan sebagai penghematan anggaran perang. Selain itu, seorang penguasa harus mengerti kebutuhan masyarakat pendukung. Tujuan dari hal itu adalah agar selalu ada surplus kekuasaan dan ketika dia membutuhkan kekuatan dalam menghadapi pemberontakan, mereka selalu siap untuk melakukan segalanya untuk penguasa. Dalam novel hal tersebut digambarkan melalui peran Komandan KOD sebagai representasi dari negara dan sementara tokoh Ranta sebagai lurah desa menjadi represi kekuasaan dominion. Komandan KOD mengangkat Ranta sebagai lurah di desanya dan memberikan kepercayaan padanya untuk menyatukan warganya dalam membantu menumpas pemberontakan. Sementara dari sisi Lurah Ranta sebagai bagian dari negara atau penguasa dominion, mempertahankan kekuasaannya dengan cara membangkitkan semangat gotong royong warganya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan dan waduk, pembukaan lahan pertanian baru, dan memberikan fasilitas pendidikan. Tindakan yang dilakukan Ranta bertujuan untuk menjaga surplus kekuasaannya melalui pemenuhan keinginan masyarakat pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisulistiyono, S. 2013. Sejarah Pemikiran Barat: Dari Klasik Sampai Yang Moderen. Rajawali P. Jakarta.
- Aisyah, Novia. 2022. "Perbedaan Latar Belakang Pemberontakan DI/TII Di Jawa Barat Dan Aceh, Sudah Tahu?" Detik.Com. Retrieved ([https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6276155/perbedaan-latar-belakang-pemberontakan-ditii-di-jawa-barat-dan-aceh-sudah-tahu#:~:text=Latar belakang DI%2FTII di,atas perjuangan rakyat Jawa Barat.](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6276155/perbedaan-latar-belakang-pemberontakan-ditii-di-jawa-barat-dan-aceh-sudah-tahu#:~:text=Latar%20belakang%20DI%20TII%20di,atas%20perjuangan%20rakyat%20Jawa%20Barat.)).
- Anon. 2021. "Pemberontakan Yang Pernah Terjadi Di Indonesia." ITATS Surabaya. Retrieved (<https://pmb.itats.ac.id/pemberontakan-yang- pernah-terjadi-di-indonesia/>).
- Benedanto, Pax. 2013. Politik Kekuasaan Menurut Niccolo Machavellai (Il Principe). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Carl, Joachim Friedrich. 2004. Filsafat Hukum Dalam Perspektif Historis, Terj. Raisul Muttaqin. 1st ed. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Colson, R. (ed). 2013. The Politics Book. London: Dorling Kindersley Limited.
- Daya Negeri Wijaya. 2016. "KONTRAK SOSIAL MENURUT THOMAS HOBBS DAN JOHN LOCKE Daya Negeri Wijaya Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang Email:" Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 1(2):183–93.
- Ganguly, Sumit. 2018. "Ending the Sri Lankan Civil War." Daedalus 147(1):78–89. doi: 10.1162/DAED_a_00475.
- Gongong, Anhar. 2004. Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemembrontak. Yogyakarta: Ombak.
- Larrain, Jorge. 1996. Konsep Ideologi. Yogyakarta: LKPSM.
- Machiavelli, Niccolo. 2017. Il Principe (Sang Pangeran). Yogyakarta: Narasi.
- Nasution, Marlian Arif dan Paisal Rahmad. 2016. "Telaah Filosofi Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." 3(1):1–23.
- Sanit, Arbi. 2016. "Kontrak Sosial Dan Pemilihan Umum." Jurnal Penelitian Politik 1(1):3–4.
- Suhelmi, Ahmad. 2007. Pemikiran Politik Barat. tiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhelmi, Ahmad, Pemikiran Politik Barat, and Gramedia Pustaka Utama. 2007. "Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hal. 165." Repository Dinus.Ac.Id 1–19.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2007. Sekali Peristiwa Di Banten Selatan. Jakarta: Lentera.
- Yasmis. 2007. "Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia." Jurnal Sejarah Lontar 4(2):25–26.